



RANCANGAN PERUBAHAN PERDA APBD PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TAHUN ANGGARAN 2022



EVALUASI PROPINSI JATIM



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 4.397.868.785.319,00 (empat triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.728.438.651,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.400.597.223.970,00 (empat triliun empat ratus milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | | | | |
|----|------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Pendapatan | | | | |
| | a. | Semula | Rp. | 3.811.388.265.941 | |
| | b. | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>19.689.132.209</u> | |
| | | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | | Rp. 3.831.077.398.150 |
| 2. | Belanja | | | | |
| | a. | Semula | Rp. | 4.397.868.785.319 | |
| | b. | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.728.438.651</u> | |
| | | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp. 4.400.597.223.970 |
| | | Defisit setelah Perubahan | | | Rp. <u>(569.519.825.820)</u> |
| 3. | Pembiayaan | | | | |
| | a. | Penerimaan | | | |
| | | - Semula | Rp. | 586.480.519.378 | |
| | | - (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(16.960.693.558)</u> | |
| | | Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 569.519.825.820 |
| | b. | Pengeluaran | | | |
| | | - Semula | Rp. | | |
| | | - Bertambah | <u>Rp.</u> | <u></u> | |
| | | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 0 |
| | | Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan | | | Rp. 569.519.825.820 |
| | | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | | | <u>Rp. 0</u> |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|
| a. | Pendapatan asli daerah | | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 648.584.268.098 | |
| | 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>46.265.613.864</u> | |
| | | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 694.849.881.962 |
| b. | Pendapatan transfer | | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 3.055.251.411.788 | |
| | 2) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>39.194.458.272</u> | |
| | | Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan | | | Rp. <u>3.094.445.870.060</u> |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 107.552.586.055 | |
| | 2) | (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(65.770.939.927)</u> | |
| | | Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp. <u>41.781.646.128</u> |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | | | | |
|----|--|-----|-------------------------|--|------------------------|
| a. | Belanja Operasi | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 2.969.492.258.828 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>67.684.460.244</u> | | |
| | Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp. | | | 3.037.176.719.072 |
| b. | Belanja modal | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 904.540.910.444 | | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(59.000.524.002)</u> | | |
| | Jumlah Belanja modal setelah Perubahan | Rp. | | | <u>845.540.386.442</u> |
| c. | Belanja tidak terduga | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 44.393.322.131 | | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(39.487.208.144)</u> | | |
| | Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | | | <u>4.906.113.987</u> |
| d. | Belanja transfer | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 479.442.293.916 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>33.531.710.553</u> | | |
| | Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan | Rp. | | | <u>512.974.004.469</u> |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

| | | | | | |
|----|--|-----|--------------------------|--|--------------------------|
| a. | Belanja pegawai | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 1.606.174.905.464 | | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(139.485.266.512)</u> | | |
| | Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | | | 1.466.689.638.952 |
| b. | Belanja barang dan jasa | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 1.224.747.006.747 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>202.724.844.613</u> | | |
| | Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. | | | <u>1.427.471.851.360</u> |
| c. | Belanja hibah | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 90.075.575.617 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>4.618.182.143</u> | | |
| | Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan | Rp. | | | <u>94.693.757.760</u> |
| d. | Belanja bantuan sosial | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 48.494.771.000 | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>-173.300.000</u> | | |
| | Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | | <u>48.321.471.000</u> |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

| | | | | |
|----|---|-----|-------------------------|------------------------|
| a. | Belanja modal tanah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 75.000.000 | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(75.000.000)</u> | |
| | Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan | Rp. | | 0 |
| b. | Belanja modal peralatan dan mesin | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 120.899.375.167 | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(9.670.229.207)</u> | |
| | Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan | Rp. | | <u>111.229.145.960</u> |
| c. | Belanja modal gedung dan bangunan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 140.288.472.383 | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(14.940.529.946)</u> | |
| | Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan | Rp. | | <u>125.347.942.437</u> |
| d. | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 619.590.833.919 | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(41.769.930.695)</u> | |
| | Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan | Rp. | | <u>577.820.903.224</u> |
| e. | Belanja modal aset tetap lainnya | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 23.687.228.975 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>7.455.165.846</u> | |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

| | | | | |
|----|--|-----|-------------------------|---------------|
| a. | Belanja tidak terduga | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 44.393.322.131 | |
| | 2) (Berkurang) | Rp. | <u>(39.487.208.144)</u> | |
| | Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | | 4.906.113.987 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

| | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|------------------------|
| a. | Belanja bagi hasil | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 22.065.196.660 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>0</u> | |
| | Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | | 22.065.196.660 |
| b. | Belanja bantuan keuangan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 457.377.097.256 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | <u>33.531.710.553</u> | |
| | Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. | | <u>490.908.807.809</u> |

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

| | | | | |
|----|---|-------------|-----|-------------------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 586.480.519.378 |
| | 2) | (Berkurang) | Rp. | <u>(16.960.693.558)</u> |
| | Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | | | Rp. 569.519.825.820 |
| b. | Pengeluaran pembiayaan | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 0 |
| | 2) | Bertambah | Rp. | <u>0</u> |
| | Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | | | Rp. <u>0</u> |

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

| | | | | |
|----|---|-------------|-----|-------------------------|
| a. | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | | |
| | 1) | Semula | Rp. | 586.480.519.378 |
| | 2) | (Berkurang) | Rp. | <u>(16.960.693.558)</u> |
| | Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp. 569.519.825.820 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S



LAMPIRAN I

**RANCANGAN
PERUBAHAN PERDA 2022**

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 648.584.268.098 | 694.849.881.962 | 46.265.613.864 | 7 % |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 248.621.940.000 | 294.321.940.000 | 45.700.000.000 | 18 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 47.683.673.929 | 48.249.287.793 | 565.613.864 | 1 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.102.248.169 | 6.102.248.169 | 0 | 0 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 346.176.406.000 | 346.176.406.000 | 0 | 0 % |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.055.251.411.788 | 3.094.445.870.060 | 39.194.458.272 | 1 % |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.790.207.210.000 | 2.810.147.792.500 | 19.940.582.500 | 1 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 265.044.201.788 | 284.298.077.560 | 19.253.875.772 | 7 % |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 107.552.586.055 | 41.781.646.128 | (65.770.939.927) | 61 % |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 21.434.337.465 | 21.434.337.465 | 0 | 0 % |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 86.118.248.590 | 20.347.308.663 | (65.770.939.927) | 76 % |
| | Jumlah Pendapatan | 3.811.388.265.941 | 3.831.077.398.150 | 19.689.132.209 | 1 % |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.969.492.258.828 | 3.037.176.719.072 | 67.684.460.244 | 2 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.606.174.905.464 | 1.466.689.638.952 | (139.485.266.512) | 9 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.224.747.006.747 | 1.427.471.851.360 | 202.724.844.613 | 17 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 90.075.575.617 | 94.693.757.760 | 4.618.182.143 | 5 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 48.494.771.000 | 48.321.471.000 | (173.300.000) | 0 % |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 904.540.910.444 | 845.540.386.442 | (59.000.524.002) | 7 % |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | 100 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.899.375.167 | 111.229.145.960 | (9.670.229.207) | 8 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 140.288.472.383 | 125.347.942.437 | (14.940.529.946) | 11 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 619.590.833.919 | 577.820.903.224 | (41.769.930.695) | 7 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 23.687.228.975 | 31.142.394.821 | 7.455.165.846 | 31 % |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 44.393.322.131 | 4.906.113.987 | (39.487.208.144) | 89 % |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 44.393.322.131 | 4.906.113.987 | (39.487.208.144) | 89 % |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 479.442.293.916 | 512.974.004.469 | 33.531.710.553 | 7 % |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 22.065.196.660 | 22.065.196.660 | 0 | 0 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 457.377.097.256 | 490.908.807.809 | 33.531.710.553 | 7 % |
| | Jumlah Belanja | 4.397.868.785.319 | 4.400.597.223.970 | 2.728.438.651 | 0 % |
| | Total Surplus/(Defisit) | (586.480.519.378) | (569.519.825.820) | 16.960.693.558 | -3 % |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 586.480.519.378 | 569.519.825.820 | (16.960.693.558) | 3 % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 586.480.519.378 | 569.519.825.820 | (16.960.693.558) | 3 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 586.480.519.378 | 569.519.825.820 | (16.960.693.558) | 3 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 % |

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|--------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 586.480.519.378 | 569.519.825.820 | (16.960.693.558) | 3 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | 0 | (0) | 100 % |

Bupati Jember

Hendy S